

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN  
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN PENGENDALIAN  
INTERN AKUNTANSI TERHADAP KETEPATWAKTUAN  
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
*(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**Oleh:**

**RIZA AGUSTIA SARI**  
**1202555/2012**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN  
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN PENGENDALIAN  
INTERN AKUNTANSI TERHADAP KETEPATWAKTUAN PELAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

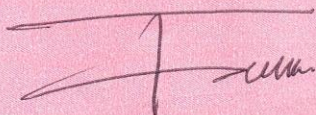
*(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)*

Nama : Riza Agustia Sari  
NIM/TM : 1202555/2012  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 04 Agustus 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing I



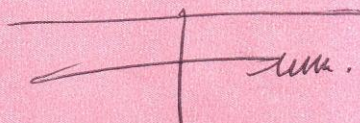
Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak  
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak  
NIP. 19801019 200604 2 002

Mengetahui  
Ketua Prodi Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak  
NIP : 19730213 199903 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

**Judul** : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat )

**Nama** : Riza Agustia Sari

**NIM/TM** : 1202555/2012

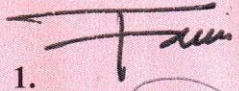
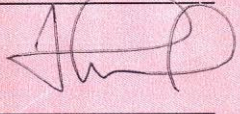
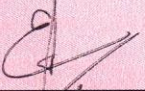
**Program Studi** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

Padang, 04 Agustus 2016

### Tim Penguji

| No | Jabatan    | Nama                           | Tanda Tangan                                                                             |
|----|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Ketua      | Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak | 1.  |
| 2. | Sekretaris | Henri Agustin, SE, M.Sc, AK    | 2.  |
| 3. | Anggota    | Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak     | 3.  |
| 4. | Anggota    | Salma Taqwa, SE, M.Si          | 4.  |

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Riza Agustia Sari  
NIM/Th. Masuk : 1202555/2012  
Tempat/Tgl.lahir : Lubuk Sao, 01 Agustus 1994  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jorong Lubuk Sao, Kel. Tanjung Sani, Kec. Tanjung  
Raya, Kab. Agam  
No.Hp/Telp : 082174486011  
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan  
Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengendalian  
Intern Akuntansi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan  
Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada  
Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis ini Sah apabila telah ditanda tangani Asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima Sanksi Akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2016  
Yang Menyatakan



**RIZA AGUSTIA SARI**  
NIM 1202555/2012

## **ABSTRAK**

**Riza Agustia Sari (2012/1202555). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat). Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2016.**

**Pembimbing I : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak**

**Pembimbing II : Charoline Cheisvianny, SE, M.Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan. Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan DPPKAD pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 19 DPPKAD. Teknik pengambilan sampel secara total sampling. Metode pengumpulan data adalah dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t.

Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan dengan nilai (sig 0.000). (2) Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan dengan nilai (sig 0.134). (3) Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan dengan nilai (sig 0.004).

Dalam penelitian ini disarankan: 1) Bagi instansi pemerintahan, untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan seoptimal mungkin dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai agar menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang bernilai yaitu ketepatanwaktuan. 2) Untuk peneliti berikutnya yang tertarik meneliti judul yang sama sebaiknya menambahkan variabel lain.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Pengendalian Intern Akuntansi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku pembimbing I dan juga kepada Ibu Caroline Cheisvianny, SE, M.AK selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Bapak dan Ibu Pimpinan beserta staf pada DPPKAD Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang telah membantu penulis memberikan data penelitian.

5. Kedua orangtua (Ayahanda Abu Bakar (Alm) dan Ibunda Arna Yuliar) serta kakak-kakak dan adik-adik tercinta (Ristina Wanti, Rinto Okta Riandi, Rahmadani, Deska Novita Sari, dan Ayu Yufika Sari) yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa tulus ikhlas serta dukungan kepada penulis.
6. Teman-teman di Fakultas Ekonomi yang banyak memberikan bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini, terutama teman-teman Program Studi Akuntansi angkatan 2012 serta spesial untuk Ovi, Yani, Rian, Radis, Reza, dan Eca yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
7. Teman-teman kos di teratai No 85 Air Tawar Barat spesial untuk Mama (Sisila Dora, S.AP), sahabatku tercinta (Putri Hayati), Tifani Denai Yanti, dan Yolla Septia Chania yang selalu memberi semangat kepada penulis.
8. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                     | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                | i       |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                          | ii      |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                              | iv      |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                            | vii     |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                           | viii    |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                        | ix      |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                                                   | 1       |
| A. Latar Belakang.....                                                              | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....                                                             | 8       |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                           | 9       |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                          | 9       |
| <b>BAB II    KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN<br/>          HIPOTESIS.....</b> | 10      |
| A. Kajian Teori .....                                                               | 10      |
| 1. Teori Agensi .....                                                               | 10      |
| 2. Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .                          | 11      |
| 3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) .....                                         | 16      |
| 4. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah .....                               | 18      |
| 5. Pengendalian Intern Akuntansi.....                                               | 23      |
| B. Penelitian Terdahulu .....                                                       | 26      |
| C. Hubungan Antar Variabel.....                                                     | 28      |
| D. Kerangka Konseptual.....                                                         | 32      |
| E. Hipotesis .....                                                                  | 34      |
| <b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>                                           | 35      |
| A. Jenis Penelitian .....                                                           | 35      |
| B. Populasi dan Sampel.....                                                         | 35      |
| C. Jenis dan Sumber Data .....                                                      | 37      |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                                    | 37      |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| E. Variabel Penelitian .....                             | 38        |
| F. Pengukuran Variabel .....                             | 38        |
| G. Instrumen Penelitian .....                            | 39        |
| H. Model dan Teknik Analisis Data .....                  | 40        |
| 1. Uji Kualitas Data .....                               | 40        |
| 2. Uji Asumsi Klasik .....                               | 41        |
| 3. Teknik Analisis Data .....                            | 43        |
| I. Definisi Operasional .....                            | 46        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                  | <b>48</b> |
| A. Gambaran Umum Responden.....                          | 48        |
| B. Karakteristik Responden.....                          | 49        |
| 1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....      | 49        |
| 2. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..... | 50        |
| 3. Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....       | 50        |
| 4. Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bekerja .....       | 51        |
| C. Teknik Analisis Data .....                            | 52        |
| 1. Statistik Deskriptif Variabel .....                   | 52        |
| 2. Menghitung Nilai Jawaban.....                         | 53        |
| D. Hasil Uji Kualitas Data.....                          | 59        |
| 1. Uji Validitas.....                                    | 59        |
| 2. Uji Reliabilitas .....                                | 60        |
| E. Uji Asumsi Klasik .....                               | 61        |
| 1. Uji Normalitas .....                                  | 61        |
| 2. Uji Multikolinearitas.....                            | 62        |
| 3. Uji Heteroskedastisitas .....                         | 63        |
| F. Hasil Penelitian.....                                 | 64        |
| 1. Uji F (F-Test).....                                   | 64        |
| 2. Koefisien Determinasi (Nilai Adjusted R Square) ..... | 65        |
| 3. Analisis Regresi Berganda.....                        | 65        |
| 4. Uji Hipotesis (t-Test) .....                          | 68        |
| G. Pembahasan .....                                      | 70        |

|                             |                                  |           |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>BAB</b>                  | <b>PENUTUP .....</b>             | <b>79</b> |
|                             | A. Kesimpulan.....               | 79        |
|                             | B. Keterbatasan Penelitian ..... | 80        |
|                             | C. Saran .....                   | 81        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> |                                  | <b>82</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>        |                                  | <b>85</b> |

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b>                                                                                                                         | <b>Halaman</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Jadwal Pelaksanaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan.....                                                                          | 3              |
| 2. Daftar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah<br>(DPPKAD) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat ..... | 36             |
| 3. Skala Pengukuran.....                                                                                                             | 39             |
| 4. Instrumen Penelitian.....                                                                                                         | 39             |
| 5. Rincian Tingkat Pengembalian Kuisisioner .....                                                                                    | 48             |
| 6. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....                                                                                   | 49             |
| 7. Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....                                                                              | 50             |
| 8. Jumlah Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....                                                                                    | 50             |
| 9. Jumlah Responden Berdasarkan Bidang Pendidikan.....                                                                               | 51             |
| 10. Descriptive Statistics.....                                                                                                      | 52             |
| 11. Distribusi Frekuensi Variabel Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan<br>Pemerintah Daerah.....                                      | 54             |
| 12. Distribusi Frekuensi Variabel Kualitas SDM .....                                                                                 | 55             |
| 13. Distribusi Frekuensi Variabel Pemanfaatan SIKD .....                                                                             | 57             |
| 14. Distribusi Frekuensi Variabel Pengendalian Intern Akuntansi .....                                                                | 58             |
| 15. Nilai Corrected Item-Total Correlation terkecil.....                                                                             | 59             |
| 16. Nilai Cronbach's Alpha.....                                                                                                      | 60             |
| 17. Uji Normalitas.....                                                                                                              | 61             |
| 18. Uji Multikolinearitas .....                                                                                                      | 62             |
| 19. Uji Heteroskedastisitas.....                                                                                                     | 63             |
| 20. Hasil Uji F Statistik.....                                                                                                       | 64             |
| 21. Adj R Square Statistiks .....                                                                                                    | 65             |
| 22. Uji T Statistiks.....                                                                                                            | 66             |

## DAFTAR GAMBAR

| Gambar                       | Halaman |
|------------------------------|---------|
| 1. Kerangka Konseptual ..... | 34      |

## DAFTAR LAMPIRAN

| <b>Lampiran</b>                                                                                   | <b>Halaman</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Kuesioner Penelitian .....                                                                     | 85             |
| 2. Tabulasi Data Penelitian .....                                                                 | 90             |
| 3. Hasil Uji Kualitas Data .....                                                                  | 102            |
| 4. Hasil Olahan data .....                                                                        | 106            |
| 5. Surat Izin Penelitian Kampus.....                                                              | 108            |
| 6. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.....                                  | 109            |
| 7. Surat Izin Penelitian Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu<br>Kabupaten Agam.....      | 110            |
| 8. Surat Izin Penelitian Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .....                       | 111            |
| 9. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kabupaten Sijunjung .....                                     | 112            |
| 10. Surat Izin Penelitian Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal<br>Kabupaten Solok ..... | 113            |
| 11. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kota Bukittinggi .....                                       | 114            |
| 12. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kota Padang .....                                            | 115            |
| 13. Surat Izin Penelitian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang<br>Panjang.....          | 116            |
| 14. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kota Payakumbuh .....                                        | 117            |
| 15. Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kota Sawahlunto .....                                        | 118            |
| 16. Surat Izin Penelitian Kantor Pelayanan dan Perizinan Kota Solok.....                          | 119            |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini perkembangan sektor publik di Indonesia ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, dimana pengertian akuntabilitas itu sendiri yaitu Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009).

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Menurut PP 71 Tahun 2010 ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Ketepatanwaktuan menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Ketepatanwaktuan juga menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan.

Ketepatanwaktuan (*timeliness*) merupakan salah satu faktor penting dalam penyajian suatu informasi yang relevan. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi yang dikandung disediakan tepat waktu bagi para pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan (Mamduh M.H, 2007). Ketepatanwaktuan berarti bahwa informasi harus segera tersedia bagi para pemakai untuk membantunya mengambil keputusan, sehingga membuat informasi itu menjadi lebih relevan terhadap kebutuhan mereka (Harrison Jr, 2012). Ketepatanwaktuan tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah

mungkin tanpa ketepatanwaktuan. Oleh karena itu, ketepatanwaktuan adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa jadwal pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan terlihat dalam Tabel 1:

**Tabel 1**  
**Jadwal Pelaksanaan Pertanggungjawaban**  
**Dan Pelaporan**

|       |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
| 31/12 | Akhir Tahun Anggaran                           |
| 28/2  | Selesai Laporan SKPD                           |
| 31/3  | Penyampaian Lap. Keu oleh Kepala Daerah ke BPK |
| 31/4  | Penggabungan Laporan Keuangan SKPD             |
| 31/5  | Selesai Audit BPK                              |
| 30/6  | Penyampaian ke DPRD                            |

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, berdasarkan penelitian sebelumnya menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan yaitu kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi (Wiwik, 2010), sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi (Celviana & Rahmawati, 2010), kemampuan sumber daya manusia (Lismawati, 2012), kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi (Fadila, 2013), sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi (Desmiyawati, 2014), dan lain-lain. Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan difokuskan berdasarkan kualitas

sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian intern akuntansi.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan atau aktivitas suatu entitas. Laporan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari faktor sumber daya manusia dalam hal ini pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena pegawai tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2009). Berbagai penelitian telah menguji hubungan sumber daya manusia dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan diantaranya penelitian Wiwik (2010) dan Celviana (2010) hasil penelitian menunjukkan sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Sedangkan pada penelitian Fadila (2013), hasil penelitian menunjukkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, dan penelitian Desmiyawati (2014) juga menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Sumber daya manusia akan sangat membantu mempercepat penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan tersebut menjadi tepat waktu.

Sistem informasi keuangan daerah (SIKD) sesuai dengan peraturan pemerintah No 56 Tahun 2006 tentang sistem informasi keuangan daerah menjelaskan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Peranan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitik beratkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan komputer, teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat waktu, relevan, dan akurat (Wilkinson dan Cerullo, 1997) dalam Dedi (2007). Berdasarkan penelitian yang telah menguji adanya hubungan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan diantaranya penelitian Nana (2013) hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD. Pada penelitian Desmiyawati (2014) hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan semakin baik pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah akan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan

bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern akuntansi mempunyai tujuan utama untuk mengamankan aset (harta kekayaan perusahaan) dan menjamin kebenaran serta ketepatan dari data akuntansi. Kurangnya pengendalian intern akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah akan menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu. Dengan demikian semakin tinggi pengendalian intern akuntansi dalam instansi pemerintah maka dapat meningkatkan ketepatwaktuan pelaporan keuangan sesuai dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun fenomena yang terjadi pada kondisi sekarang, banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Berdasarkan Laporan BPK RI yang dikutip dari berita online nasional (Pikiran Rakyat, 9/04/2015) menyatakan bahwa sedikit pemerintah daerah yang telah melaporkan ke BPK. Daerah sangat lamban menyampaikan laporan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, dari 542 pemerintah

daerah (Pemda) yang baru diterima laporannya pada semester II 2014, baru 68 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Padahal berdasarkan pasal 297 ayat 1 Permendagri No 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa laporan keuangan harus disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, atau paling lambat pada akhir Maret.

Berdasarkan catatan BPK jumlah Pemda sampai dengan semester II Tahun 2014 adalah 542, namun yang telah menyusun LKPD Tahun 2013 hanya 524 pemerintah daerah. Total aset 524 LKPD pada akhir Tahun 2013 senilai Rp 2.006,6 triliun, total kewajiban senilai Rp 21,4 triliun dan total ekuitas senilai Rp 1.990,75 triliun. Sedangkan total pendapatan dan belanja selama 2013 adalah senilai Rp 726,56 dan senilai Rp 709,77 triliun. Dengan jumlah aset, ekuitas, pendapatan, dan belanja yang besar tersebut, pemerintah daerah memiliki peran yang besar dalam pembangunan daerah. Sehingga sudah seharusnya Pemda dapat mengelola dan mengadministrasikan keuangannya dengan baik dan benar yang diukur dengan indikator perolehan opini WTP dan penggunaan keuangan negara yang ekonomis, efisien dan efektif.

Dalam penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan ketepatan waktu dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus tepat waktu sehingga bermanfaat bagi para pemakai.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria tepat waktu. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Sejauhmana pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat ?
3. Sejauhmana pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pengaruh pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada:

1. Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu.
3. Bagi institusi pendidikan, sebagai khasanah penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan akademika.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Teori Agensi**

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam, yaitu: (1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan (2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan yang wajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistis dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggungjawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah

daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah (Safitri, 2009) dalam (Desmiyawati, 2014)

## **2. Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **a. Pengertian Pelaporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan *output* akhir dari proses akuntansi yang dilaksanakan di tingkat SKPD dan PPKD. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Nunuy, 2010). Dalam butir 22 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 disebutkan bahwa entitas pelaporan keuangan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan entitas lainnya (Dedi, 2007).

Dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode. Di Indonesia, laporan

keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 30 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: (1) Laporan Realisasi APBN/D, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan dan (5) Lampiran laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya. Laporan Keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, hal tersebut dilakukan agar informasi dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat.

Menurut Suwardjono (2005) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam *Statement Offinancial Accounting Concepts* mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan.

#### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya manusia. Menurut Nunuy (2010) secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna

untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang di percayakan kepadanya, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya manusia, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

**c. Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan**

Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan sangat mempengaruhi ketersediaan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, ketepatanwaktuan pelaporan keuangan tidak hanya bermanfaat untuk organisasi sektor publik namun juga berdampak pada ketersediaan

informasi di organisasi non sektor publik. Beberapa pengertian tentang ketepatanwaktuan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.
- 2) Menurut Mamduh M.H (2007) Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan merupakan ketersediaan informasi ke pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan, jika informasi tidak ada pada waktu dibutuhkan untuk membuat keputusan, maka informasi tersebut tidak lagi relevan dan tidak mempunyai manfaat untuk pengambilan keputusan. Untuk menentukan prestasi perusahaan lebih akurat, pembatas waktu diperlukan.
- 3) Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Dari berbagai teori yang telah dikemukakan mengenai ketepatanwaktuan pelaporan keuangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa sangat pentingnya ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Karena dilihat dari sisi manajemen perusahaan laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi, sedangkan

dari sisi pemakai eksternal laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Kendala ketepatanwaktuan penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi yang membutuhkan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Ketepatanwaktuan berarti bahwa informasi harus segera tersedia bagi para pemakai untuk membantunya mengambil keputusan, sehingga membuat informasi itu menjadi lebih relevan terhadap kebutuhan mereka (Horrison Jr, 2012).

ketepatanwaktuan menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. ketepatanwaktuan juga menunjukan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan. ketepatanwaktuan tidak menjamin relevansi tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatanwaktuan adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan.

### 3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Semula SDM merupakan terjemahan dari “*human resources*”, namun ada pula ahli yang menyampaikan sumber daya manusia dengan “*manpower*” (tenaga kerja). Bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya). Setiap organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya manusia untuk mencapai tujuannya. SDM merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi (Wirawan, 2009).

Menurut Edy (2009) sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, pengembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Sedangkan menurut Werter dan Davis (1996) dalam Edy (2009), menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi menurut Ndaha (1999) adalah sumber daya yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tinggi seperti: *intelligence*,

*creativity*, dan *imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Fadila, 2013). Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan suatu kegiatan atau tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, maka sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Menurut Wirawan (2009) Istilah SDM mencakup semua yang terdapat dalam diri manusia yang anantara lain terdiri atas dimensi-dimensi berikut ini:

- a. Fisik manusia. Keadaan fisik manusia meliputi tinggi-rendah atau berat-ringannya manusia, sehat-sakitnya fisik manusia, cantik-tampan atau tidaknya, serta kuat-lemahnya fisik manusia. Kemampuan fisik digunakan untuk menggerakkan, mengerjakan, atau menyelesaikan sesuatu;

- b. Psikis manusia. Keadaan psikis/kejiwaan manusia antara lain meliputi sehat atau sakitnya jiwa manusia, motivasi, semangat dan etos kerja, kreativitas, inovasi, dan profesionalisme manusia;
- c. Sifat atau karakteristik manusia. Karakteristik manusia terdiri atas kecerdasan (kecerdasan intelektual, emosional, spritual, dan sosial), energi atau daya untuk melakukan sesuatu, bakat, dan kemampuan untuk berkembang;
- d. Pengetahuan dan keterampilan manusia. Pengetahuan manusia meliputi tinggi-rendahnya pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki manusia;
- e. Pengalaman manusia. Pengalaman manusia meliputi pengalaman yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan.

Menurut Laporan akhir studi GTZ & USAID/CLEAN Urban (2001) dalam Fadila (2013) indikator-indikator yang terdapat pada kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut; (a) sumber daya yang berkualitas; (b) latar belakang pendidikan; (c) uraian peran dan fungsi; (c) peran dan tanggungjawab; (d) fungsi akuntansi; (e) proses dan prosedur akuntansi; (f) proses akuntansi; (g) sumber daya pendukung operasional; (h) pelatihan keahlian dalam tugas; dan (i) anggaran dana.

#### **4. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah**

##### **a. Pengertian Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Suatu sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang di organisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan

informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi (Henry C.Lucas dalam Jogiyanto, 2000). Salah satu bentuk spesifik sistem informasi adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIKD.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah:

“Merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah”.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah. Sistem ini dimaksudkan untuk perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.

#### **b. Informasi Keuangan Daerah**

Informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah. Informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah (Menteri Keuangan dan menteri Dalam Negeri) mencakup:

- 1) APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota termasuk perubahan APBD;
- 2) Neraca daerah;
- 3) Laporan arus kas;
- 4) Catatan atas laporan keuangan daerah;
- 5) Dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan;
- 6) Laporan keuangan perusahaan daerah; dan
- 7) Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Penyampaian informasi keuangan daerah dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Batas waktu penyampaian informasi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya perubahan APBD tahun berjalan.
- 2) Paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD per semester.
- 3) Paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, informasi mengenai dana dekosentrasi dan dana tugas pembantuan, laporan keuangan perusahaan daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah tahun lalu.

### c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Menurut Ahmad (2009) penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah menjelaskan tentang pokok-pokok muatan peraturan pemerintah antara lain, mekanisme penyampaian laporan keuangan daerah, prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem informasi keuangan di daerah, standar, dan format informasi keuangan di daerah, dan mekanisme penerapan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. SIKD secara Nasional diselenggarakan oleh Menteri Keuangan dan memiliki fungsi:

- 1) Penyusunan Standar Informasi Keuangan Daerah;
- 2) Penyajian Informasi Keuangan Daerah kepada daerah;
- 3) Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi;
- 4) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD;
- 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD;
- 6) Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi; dan
- 7) Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SIKD di masing-masing daerah mempunyai tujuan:

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah;

- 2) Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah;
- 3) Membantu Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah;
- 4) Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah;
- 5) Menyajiakan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat; dan
- 6) Mendukung penyediaan Informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam SIKD.

**d. Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah**

Peranan komputer sekarang terasa sangat besar bila benar-benar dapat memanfaatkannya dan sistem informasi sekarang selalu dikaitkan dengan penggunaan komputer. Untuk organisasi yang ingin maju dan berkecimpung dalam pasar persaingan yang sangat ketat, bila tidak menggunakan komputer dalam sistem informasinya, sedang pesaingnya menggunakannya, maka informasi yang didapat dari sistemnya mungkin telah usang dan tidak tepat waktunya lagi dan yang paling banyak membutuhkan informasi yang cepat dan tepat serta relevan adalah manajemen di dalam organisasi tersebut. Menurut Ahmad (2009) untuk terselenggaranya proses penyampaian informasi yang cepat dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, indikator-indikator yang terdapat pada pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) adalah sebagai berikut:

- 1) Proses dokumentasi, administrasi, dan pengolahan data pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIKD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Penyediaan informasi keuangan daerah dalam rangka mendukung SIKD.

## **5. Pengendalian Intern Akuntansi**

### **a. Pengertian Pengendalian Intern Akuntansi**

Sistem pengendalian intern didefinisikan pertama kali pada tahun 1949 oleh AICPA dalam (Jogiyanto, 2000), pengendalian intern meliputi struktur suatu organisasi dan semua metode-metode yang terkoordinir serta ukuran-ukuran yang ditetapkan di dalam suatu perusahaan untuk tujuan menjaga keamanan harta kekayaan milik perusahaan, memeriksa ketepatan dan kebenaran data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi kegiatan, dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan-kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern menyatakan bahwa:

“Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut Arrens (2008) sistem pengendalian intern terdiri atas kebijakan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Pengendalian intern akuntansi mempunyai tujuan utama untuk mengamankan aset (harta kekayaan perusahaan) dan menjamin kebenaran serta ketepatan dari data akuntansi.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pengendalian intern akuntansi merupakan suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan pengukuran ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian intern akan mempengaruhi pengukuran ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **b. Unsur-unsur Pengendalian Intern Akuntansi**

Unsur-unsur pokok yang diciptakan dalam menciptakan pengendalian akuntansi yang efektif antara lain (Wahana Komputer, 2003): (a) adanya perlindungan fisik terhadap harta; (b) pemisahan fungsi

organisasi yaitu pemisahan fungsi organisasi yang saling berkaitan; (c) adanya jejak audit yang baik; dan (d) sumber daya yang optimal.

**c. Komponen Pengendalian Intern Akuntansi**

Menurut Mahmudi (2007) dalam Desmiyawati (2014), komponen penting dari pengendalian intern organisasi terkait dengan sistem akuntansi antara lain sebagai berikut:

1) Sistem dan prosedur akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi (pasal 98 PP Nomor 58 Tahun 2005): (a) Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas; (b) Sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran kas; (c) Sistem dan prosedur akuntansi aset; dan (d) Sistem dan prosedur akuntansi selain kas.

2) Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Otorisasi bisa dalam berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah atau ilegal.

### 3) Formulir, dokumen, dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

### 4) Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pencatatan uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Penelitian Wiwik Andriani (2010), melakukan penelitian tentang “pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah” (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan

laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Celviana & Rahmawati (2010), melakukan penelitian tentang pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). Hasil penelitiannya membuktikan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Lismawati (2012), melakukan penelitian tentang pengaruh kemampuan sumber daya manusia terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kemampuan sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian Fadila Ariesta (2013), meneliti tentang pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

(Studi pada SKPD Kab. Pasaman Barat). Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Disamping itu, kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Desmiyawati (2014), melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemda Riau). Hasil penelitian membuktikan bahwa SDM, pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan, sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan. Sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **C. Hubungan Antar Variabel**

#### **1. Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Lismawati (2012) seorang pegawai dengan kemampuan yang baik akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan dalam suatu organisasi. Jika kemampuan yang dimilikinya baik dan dapat mencapai target yang ditetapkan maka batasan waktu yang telah ditentukan dapat terpenuhi sehingga pelaporan keuangan dapat menjadi tepat waktu.

Penelitian Fadila (2013) yang meneliti tentang pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada SKPD Kab. Pasaman Barat). Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Desmiyawati (2014), yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemda Riau). Hasil penelitian membuktikan Sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari faktor Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai. Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena pegawai tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu.

## **2. Hubungan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dengan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan

keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (PP No.56 th 2005 tentang SIKD). SIKD merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu pelaporan keuangan dapat tersedia tepat waktu dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah.

Jika *good governance* ingin tercipta dengan baik, maka pemerintah daerah harus memikirkan sebuah sistem informasi yang memiliki nilai tambah (*value added*) dalam mengatasi kompleksitas-kompleksitas pada lingkungan pemerintah. Supaya sistem yang terbentuk dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis maka sistem informasi harus diimbangi dengan kemajuan teknologi informasi (Jabal, 2012).

Penelitian yang dilakukan Nana (2013) hasil penelitian membuktikan bahwa peran manager dalam penganggaran dan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja SKPD. Penelitian Putu (2014) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan sistem informasi keuangan akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, tanpa teknologi informasi maka staf akan melaksanakan tugas secara manual, sehingga semakin baik pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pembuatan laporan keuangan dan meningkatkan keakuratan dalam penyampaian laporan keuangan.

### **3. Hubungan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penelitian Putu (2014) yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, hasil penelitian membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan kualitas informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar.

Kurangnya pengendalian intern akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah akan menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan pelaporan keuangan daerah, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu. Dalam kaitannya dengan pengukuran ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah maka baik buruknya implementasi sistem pengendalian intern akan mempengaruhi pengukuran ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi pengendalian intern akuntansi dalam instansi pemerintah maka dapat meningkatkan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan sesuai dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Sebagai Variabel Dependen Dan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Pengendalian Intern Akuntansi Sebagai variabel independen.

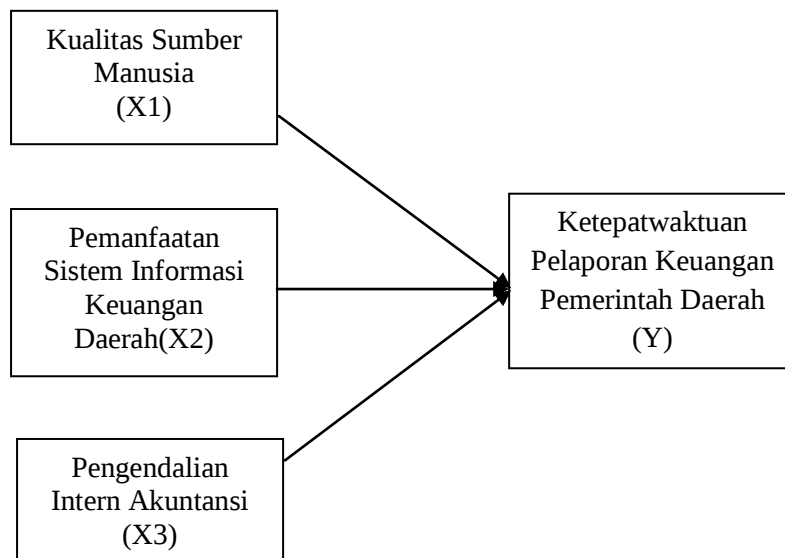
Hal yang pertama mungkin mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan adalah kualitas sumber daya manusia. Menurut Lismawati (2012) seorang pegawai dengan kemampuan yang baik akan melaksanakan tugas dan

funksinya dengan sebaik mungkin sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pimpinan dalam suatu organisasi. Jika kemampuan yang dimilikinya baik dan dapat mencapai target yang ditetapkan maka batasan waktu yang telah ditentukan dapat terpenuhi sehingga pelaporan keuangan dapat menjadi tepat waktu.

Hal kedua yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah adalah pemanfaatan SIKD. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah (IKD) kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Hal ketiga yang mungkin mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan adalah pengendalian intern akuntansi. pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan laporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian semakin tinggi pengendalian intern dalam instansi pemerintah maka dapat meningkatkan *timeliness* pelaporan keuangan sesuai dengan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hubungan antara variabel diatas maka dijelasnya pada kerangka konseptual tentang bentuk pengaruh antar variabel independen dan dependen yang digunakan oleh gambar di bawah ini :



**Gambar 1.**  
**Kerangka Konseptual**

### **E. Hipotesis**

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis yang ingin dibuktikan dari penelitian ini adalah:

- $H_1$  : Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- $H_2$  : Pemanfaatan Sistem Informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan pemerintah keuangan daerah.
- $H_3$  : Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan pemerintah keuangan daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi sektor publik (SKPD) maka akan semakin baik pula ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menghasilkan outcome dan hasil yang diharapkan kemungkinan akan mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Pengendalian intern akuntansi dalam suatu organisasi sektor publik (SKPD) maka akan semakin baik pula ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :.

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 39,6% sedangkan sisanya 60,4% ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemilihan penelitian ini dilakukan pada DPPKAD Kab dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Dikarenakan hanya dilakukan pada satu SKPD saja dan satu provinsi, maka perlu disadari bahwa metode ini berakibat pada lemahnya validitas exsternal atau kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian ini.
3. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner dan dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Namun wawancara yang dilakukan hanya pada beberapa sampel yaitu empat Kab/ Kota yang WDP dan WTP.

### C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi instansi pemerintahan, diharapkan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki serta didukung dengan pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah seoptimal mungkin dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai agar menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang bernilai yaitu ketepatanwaktuan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah dan pengendalian intern akuntansi untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat dengan penyerapan anggaran seperti pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan faktor lainnya.
3. Penelitian selanjutnya, jumlah SKPD yang dijadikan sampel penelitian sebaiknya diperbanyak sehingga kesimpulan yang dibuat dimungkinkan untuk dapat digeneralisasi, dan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Ahmad, Yani. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arrens, A Alvin., Elder, J Randal & Beasley, S Mark. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Kedua Belas. Jakarta: Salemba Empat.
- Celviana, Winidyaningrum & Rahmawati. 2010. “Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi: Studi Empiris Di Pemda Subosukawonosraten”. *Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Porwokerto.
- Dedi, Nordiawan. 2007. *Akuntansi Pemerintahan* . Jakarta: Salemba Empat.
- Dedi, Rianto R. 2007. *Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan Di Sektor Publik*. Seminar Nasional Teknologi: Yogyakarta.
- Desmiyawati. 2014. “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Study Empiris Pada SKPD Pemda Riau”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2. Hal 163-178.
- Edy, Sutrisno. 2009. *Manajemen SDM*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Fadila, Ariesta. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang.
- Harrison Jr, Walter T, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard-IFRS*. Edisi Kedelapan Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Imam, Ghozali. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<http://www.pikiran-rakyat.com> (diakses pada tanggal 3 Maret 2016)

- Jabal, Firadaus A & Suryo, Pratolo. 2012. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kepuasan Aparatur Pemerintah Daerah menggunakan Model Dclone dan MOLEAN. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 13 No.1, halaman 28-34.
- Jogiyanto, HM. 2000. *Sistem Informasi Berbasis Komputer: Konsep Dasar dan Komponen. Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Lismawati. 2012. Pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Volume: 04 No. 04, Juli-Desember 2012 ISSN: 1979-7338.
- Mamduh M Hanafi & Abdul Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nana, Septry. 2013. *Pengaruh Peran Manajer dalam Penganggaran dan Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kinerja SKPD (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)*. Skripsi, Universitas Negeri Padang.
- Nunuy, Nur Afiah. 2010. *Akuntansi Pemerintah : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana
- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putu, Upabayu R M dan Wawan, Putra. 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2 (2014): 230-244. ISSN: 2302-8556.

- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta. BPFE
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikasi Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andy.
- Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja SDM, Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wiwik, Andriani. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol 5 No.1 Juni 2014 ISSN hal 69-80.